



Annual Report 2024



Perluasan Peranan PIP
dalam melayani UMKM
yang inklusif

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
7 Tahun Berkarya	5
Riwayat Singkat	7
Profil BLU PIP	9
Kaleidoskop 2024	19
Laporan Manajemen	74
Laporan Keuangan	79



Kata Pengantar

Laporan Tahunan 2024

Selamat datang kembali di beranda Laporan Tahunan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP). “Perluasan Peranan PIP dalam melayani UMKM yang inklusif” menjadi tema yang mendorong kami terus berkarya bagi negeri tercinta. Tema ini berkesinambungan melanjutkan tema tahun sebelumnya: “Berbenah untuk menjadi lebih baik dalam melayani UMKM”.

Setelah melakukan pembenahan dalam melayani UMKM, kini saatnya PIP memperluas peranannya dalam melayani UMKM yang inklusif. Hal ini menguatkan komitmen kami dalam mendorong inklusi pembiayaan Ultra Mikro pada UMKM.

Dengan proporsi jumlah pelaku ekonomi yang besar, kontribusi UMKM atas Produk Domestik Bruto Indonesia lebih dari 60 persen. UMKM juga mampu menyerap 97 persen tenaga kerja dan sekitar 60 persen dari total investasi di Indonesia.

Demi mewujudkan misi mendukung UMKM, kami membuat beberapa inovasi, antara lain melalui *Initiative Credit Scoring* (ICS), penggunaan *Virtual Account* (VA), *UMi Connect*, serta *PIP Empower*. Program ini mampu memperluas peranan PIP dalam memberikan pembiayaan pada UMKM yang semakin inklusif.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberi kepercayaan kepada kami, khususnya kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Wakil Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dewan Pengawas BLU-PIP, Direktur Sistem Manajemen Investasi selaku pembina teknis, dan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU selaku pembina keuangan BLU-PIP.

Kami tetap optimis untuk memperluas peran PIP dalam melayani UMKM yang inklusif.

Ismed Saputra

Direktur Utama PIP







Tentang Tema

Tujuh Tahun Berkarya 2024

Selama tujuh tahun berkarya, kami telah melaksanakan berbagai program pembiayaan dalam rangka mendukung usaha Ultra Mikro (UMi). Kami merasa layanan kami belum optimal, karena itu berbagai inovasi telah kami lakukan dan akan terus dilakukan dalam rangka memperluas inklusi ekonomi bagi sektor usaha mikro.

Demi mewujudkan misi mendukung UMKM, kami membuat beberapa inovasi, antara lain *Innovative Credit Scoring* (ICS), penggunaan *Virtual Account* (VA), *UMi Connect*, serta *PIP Empower*. Program ini mampu memperluas peranan PIP dalam memberikan pembiayaan pada UMKM yang semakin inklusif.

Innovative Credit Scoring (ICS) kami kembangkan dalam rangka memitigasi risiko pembiayaan tidak hanya pada aspek financial namun juga pada aspek non financial, penggunaan *Virtual Account* (VA) dilakukan dalam rangka mempermudah pembayaran angsuran oleh penyalur, *UMi Connect* dilakukan dalam rangka digitalisasi penyaluran, sementara *PIP Empower* dikembangkan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya pada penyalur, maupun perluasan kerja sama dengan berbagai pihak.



Riwayat Singkat PIP

Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) dibentuk pada tahun 2007 dengan mandat awal untuk menyediakan sarana infrastruktur. Berada di bawah naungan Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah (SKS-BIP), BLU PIP menunjukkan kinerja gemilang dan resmi menjadi Badan Layanan Umum penuh pada tahun 2009.

Seiring dengan penggabungan mandat infrastruktur ke BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) di Tahun 2015, BLU PIP mengalami pergeseran peran. Seluruh aset BLU PIP dialihkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT SMI.

Pada 5 Juli 2017, Kementerian Keuangan merevitalisasi tugas dan fungsi BLU PIP. Lembaga ini bertransformasi menjadi koordinator pembiayaan yang fokus pada penyediaan pembiayaan bagi para pelaku usaha ultra mikro yang belum tersentuh oleh program Kredit Usaha Rakyat.

Saat ini BLU PIP beroperasi berdasarkan PMK 91/PMK.01/2017 dan memiliki tugas utama untuk melaksanakan koordinasi di bidang PIP yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai arahan Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan.



Brand BLU PIP

Nama	Pusat Investasi Pemerintah
Nama Singkat	PIP
Bidang usaha	Pengelolaan Dana yang difokuskan pada kelompok usaha Ultra Mikro dengan pembiayaan maksimal Rp100 juta.
Tanggal Pembentukan	5 Juli 2017
Dasar Pembentukan	Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
Jumlah Penyalur dan Linkage	• Penyalur Linkage 44 LKBB • Penyalur langsung 56 LKBB • Penyalur tidak langsung 1 lembaga
Alamat Kantor	Jl. Dr. GSSJ Ratulangi No.17, RT.2/RW.3, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat

**Call Center**

Telp: 62-21 3924822

**Situs Web**

pip.kemenkeu.go.id

**Pengaduan**

pengaduan.pip@kemenkeu.go.id

**Email Address**

sekre.pip@kemenkeu.go.id

**Youtube**

Pusat Investasi Pemerintah

**Instagram**

[@pusatinvestasipemerintah](https://www.instagram.com/pusatinvestasipemerintah)

**Facebook**

[pengaduan.pip@kemenkeu.go.id](https://www.facebook.com/pengaduan.pip@kemenkeu.go.id)

**Contact Center**

hai.kemenkeu.go.id

Profil BLU PIP

MISI 1

Melaksanakan pengelolaan dana bergulir usaha mikro yang prudent, efisien, dan efektif;

2

Menyalurkan pembiayaan yang mudah dan cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab;



VISI

Menjadi koordinator pendanaan pembiayaan ultra mikro yang profesional dan kredibel.

3

Mengembangkan sistem informasi pembiayaan ultra mikro yang andal, profesional dan modern;

4

Melakukan kerja sama pembiayaan dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya;

5

Melakukan edukasi kepada penyalur dan penerima pembiayaan ultra mikro.







Benefit Pembiayaan UMKM

- **Pendampingan**

Pendampingan yang akan didapatkan oleh UMKM antara lain, pemberian motivasi usaha, peningkatan kapasitas SDM, konsultasi terkait usaha, pengawasan terhadap debitur.

- **Pemberdayaan**

Pemberdayaan dilakukan melalui, Pelatihan teknis usaha/produksi, (pembukuan keuangan usaha, branding produk, pemasaran online). Promosi / pemasaran produk (melalui sosial media PIP, *marketplace*, lelang produk online, pameran/expo produk offline, Gerai UMi di pusat perbelanjaan, Kedai UMi, Kampung UMi dan publikasi melalui media massa). Pemberdayaan berbasis komunitas dan terintegrasi pada sektor pertanian dan produk kerajinan. Inkubasi Usaha (aspek pemenuhan legalitas, peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pengelolaan keuangan dan pemasaran produk).

Kerja sama Program dan Pendanaan

BLU-PIP bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional dan universitas, dalam pemberian program inkubasi, literasi, dan berbagai pelatihan yang bermanfaat bagi debitur UMKM.

Kehadiran PIP

Kami hadir di seluruh Indonesia Sebagai Badan Layanan Umum di bawah naungan Kementerian Keuangan, PIP hadir untuk membantu memajukan perekonomian Indonesia melalui pembiayaan usaha ultra mikro. Kami berkomitmen untuk menyalurkan pembiayaan yang mudah dan bersahabat dengan prinsip pengelolaan dana bergulir secara hati-hati. Dedikasi kami selama tujuh tahun (2017-2023) telah mengantarkan layanan UMi ke hampir seluruh penjuru negeri.

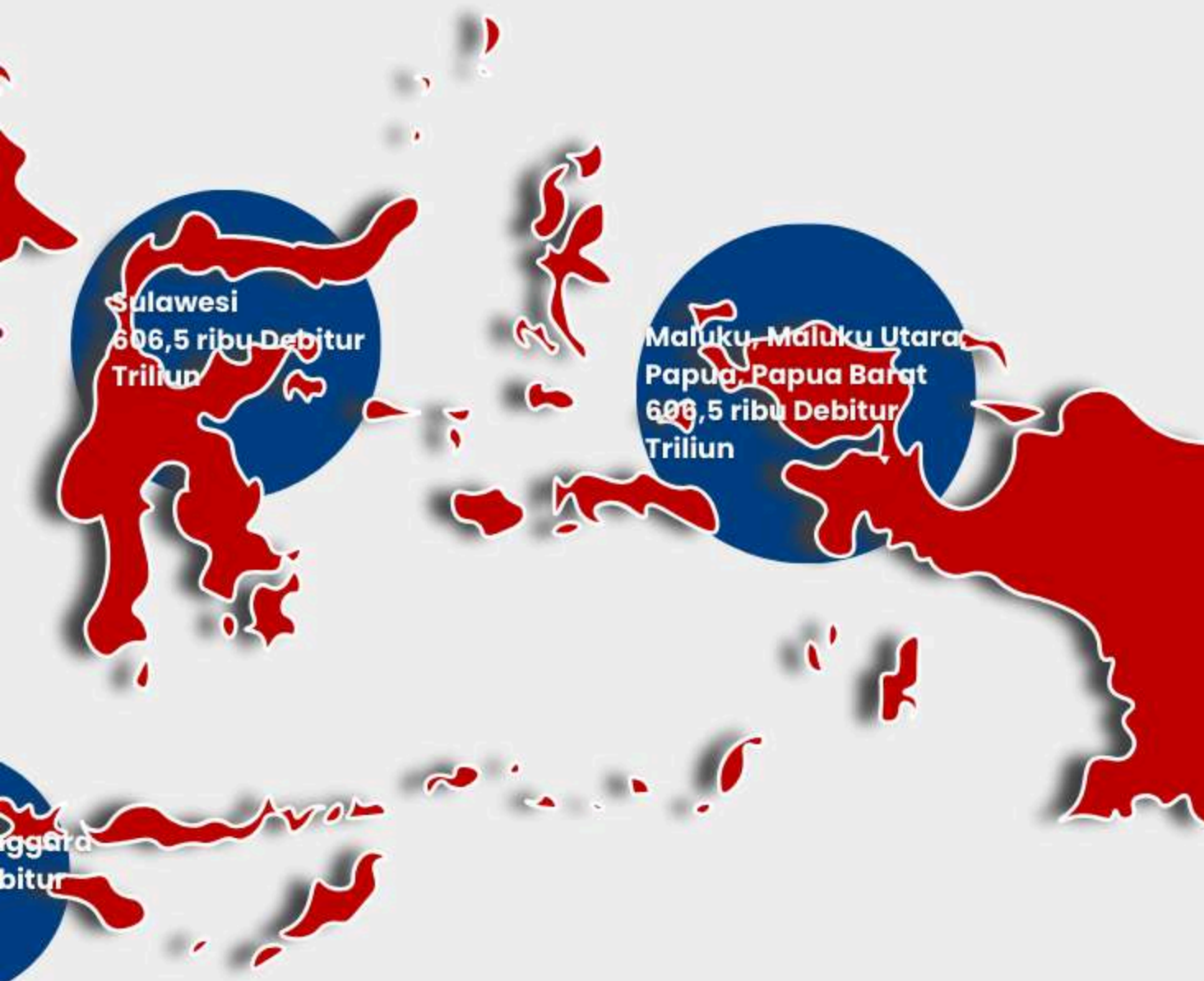


Jumlah Penyaluran Per Wilayah 2017–2024 **Rp46,30Triliun**

Jumlah Provinsi
Kab/Kota Tersalurkan

34 Provinsi 510 Kab/Kota

Total Debitur 11,76Juta



Penyaluran Pem Realisas

98,91%

Debitur Perempuan

1,09%

Debitur Laki-laki

57,80%

Akad Syariah

42,20%

Akad Konvensional



biayaan UMKM

i 46,64 T

96,93%

Perdagangan
Eceran

1,99%

Perikanan,
Pertanian &
Perkebunan

0,47%

Jasa

0,34%

Industri
Pengolahan





509

Kabupaten/kota



Rp9,5 Triliun

total pembiayaan

Mitra Kami

Penyalur langsung afiliasi pemerintah

- PT Permodalan Nasional Madani (PTPNM)

Penyalur tidak langsung (*linkage*)

- PT Bahana Artha Ventura (PT BAV)

Penyalur tidak langsung (PT BAV)

Koperasi Mitra Dhuafa

KSPPS BMT Artha Sejahtera

KSPPS Bina Ihsanul Fikri

KSPPS Kube Sejahtera Unit 068

KSPPS Surya Abadi Riyanto

KSPPS Nusa Umat Sejahtera

Penyalur langsung non afiliasi pemerintah

- Koperasi LKMA Anugerah Tani Makmur
- KSPPS Artha Bahana Syariah
- KSP KUD Mintorogo
- KSPPS Abdi Kerta Raharja
- KSP Guna Prima Dana
- KSPPS Raya Banda Madani
- PT LKM Genta Persada
- KSP Kopdit Pelangi Kasih
- KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan
- LKMA Mojo Agung Sejahtera Kendal
- KSU Gapoktan Al Basiko II
- Koperasi Konsumen Al Manar Sejahtera Bersama
- KSPPS BMT Jati Padang
- PT LKM BKD Batang
- KSP Karya Baitul Mandiri



90

Lembaga Penyalur



2,2 Juta
Debitur

- KSPPS Benteng Mikro Indonesia
- Koperasi Mitra Dhuafa Syariah
- PT LKMS Mahirah Muamalah
- Koperasi Jasa Karya Abadi
- KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi
- KSP Permata Siaga
- PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia
- KSPPS BMT Al Ishlah
- KSPPS BMT Ibaadurrahman
- Koperasi Central Utama Mandiri
- KSPPS BMT Niaga Utama
- KSPPS BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera
- KSPPS BMT Ayyasi
- KSPPS BMT Bina Auladi Mandiri
- KSPPS Artha Bahana Syariah
- KSP Permata Utama Tabanan

- KSPPS BMT El Itqon
- KSPPS BMT Al Fataya
- KSPPS Muhammadiyah Surya Mandiri
- KSPPS Nusa Ummat Sejahtera
- KSP Mitra Dhuafa
- Koperasi Dana Raharja
- KSPPS BMT Ampek Jurai Masjid Raya Lantai Batu
- KSP Citra Mandiri Jabar
- KSPPS KSP Harapan Bersama Kalingga
- KSPPS BMT Muhammadiyah Sumatera Barat
- PT LKM Sedasa
- KSPPS BMT Alhikmah Semesta
- KSPPS BMT Huwaiza
- PT LKM BKD Pekalongan
- PT BAV (langsung)

Kalendaris korp 2024

Januari

PIP mulai menempati gedung baru di Jl. Dr. GSSJ Ratulangi No.17, RT.2/RW.3, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

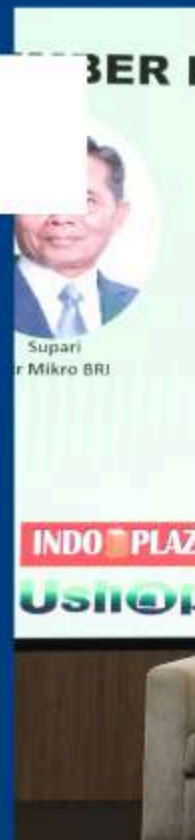


M

PIP be
Ramo
Produ
Jakan

April

Gerakan Digitalisasi 1.000.000
Sektor Industri Mikro dan Kecil.
Jakarta, 5 April 2024





Februari

PIP melakukan lelang Produk Unggulan Debitur UMi.

Maret

berpartisipasi dalam kegiatan
adhan Fair 2024 menampilkan
Produk Unggulan Debitur UMi.
ta, 15 - 20 Maret 2024.



Kalendariskop 2024

Mei

Menteri Keuangan meresmikan gedung baru PIP. Jakarta, 17 Mei 2024.



Juli

Penyelenggaraan Kegiatan Festival UMi 2024. Jakarta, 18-20 Juli 2025.





Juni

Kick off UMi Youthpreneur 2024, dalam rangka menjangking wirausaha muda. Makassar, 3 Juni 2024

Juli

Pada Peringatan Hari Koperasi Nasional, PIP turut berpartisipasi dalam acara Gelar Produk Koperasi yang diselenggarakan Pemprop Jawa Barat di Karawang, 12-14 Juli 2024.



Kalendariskop 2024

Agustus

Walk InTress & Festival UMKM 2024.
Purwokerto, 3-4 Agustus 2024.



Se

Penye
DIFAB
17-18

September

Peresmian Program Kampung UMi
Klaster Tenun. Nusa Tenggara Timur,
17 September 2024





Agustus

Penyelenggaraan Kegiatan UMi Youthpreneur 2024. Jakarta, 7-8 Agustus 2024.



September

Penyelenggaraan Kegiatan UMi Youthpreneur. Yogyakarta, 7-8 September 2024.



Kalendariskop 2024

September

Berpartisipasi dalam Kegiatan
PPUMI. Jakarta, 18 – 20 September
2024.



Oktober

Berpartisipasi dalam Kegiatan ISEF.
Jakarta, 30 Oktober 2024.





Oktober

Dukungan Kegiatan ATF. Bali, 3-4 Oktober 2024. ISEF 2024.



Oktober

Panen perdana dan Launching Kampung UMi Klaster Madu. Purwokerto, 17 Oktober 2024



Kalendaris korp 2024

Oktober

Berpartisipasi dalam UMKM Expo pada beberapa Kota, antara lain: Fakfak, Ternate, Banten, Palu, Sumbawa Besar, Kaltara, dan beberapa kota lainnya.



Desember

PIP berkolaborasi dengan UN WOMEN dalam kegiatan We Connect. Bali, 8 Desember 2024.





November

Penyelenggaraan Kegiatan PIP Empower dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Koperasi Penyalur. Bandung, 11 -13 November 2024.



November

Penyelenggaraan Kegiatan PIP Empower dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Koperasi Penyalur. Bandung, 11 -13 November 2024.



MENJANGKAU YANG BELUM TERSENTUH









Tata Kelola

Apa itu **Pembiayaan UMi**?

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha ultra mikro (UMi) yang belum terjangkau oleh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan yang berasal dari fasilitas perbankan. Dalam rangka meningkatkan jumlah wirausaha yang difasilitasi pemerintah, Kementerian Keuangan menunjuk PIP sebagai koordinator pembiayaan ini. Tujuan utamanya agar para pengusaha ultra mikro dapat memperoleh pembiayaan dengan mudah dan cepat.

PIP fokus pada pengusaha ultra mikro yang layak secara usaha walaupun belum *bankable*, menurut perbankan. Program ini menyediakan pembiayaan sampai dengan Rp20 juta per nasabah. Dana program pembiayaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah serta lembaga keuangan domestik maupun internasional. Dalam lima tahun pertama beroperasinya, PIP mendapatkan pembiayaan dari APBN. Pada awal berjalannya, PIP mendapat alokasi Rp1,5 Triliun dari APBN dan terakhir pada Tahun 2021, kembali PIP mendapat alokasi APBN sebesar Rp2 Triliun. Total dana APBN sampai dengan akhir Tahun 2021 menjadi sebesar Rp10 Triliun.





Ekosistem

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Dalam menyalurkan dana, PIP bertindak sebagai perantara, merangkul lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang sudah ada dan berpengalaman dalam menyediakan pinjaman bagi UMKM. sebagai mitra/lembaga penyalur. Hal ini bertujuan agar penyaluran dana dapat tepat sasaran dan dapat menekan jumlah kredit bermasalah. Mitra penyalur wajib menggulirkan seluruh dana dalam bentuk pembiayaan Ultra Mikro. Dengan strategi ini, dana bergulir yang telah disalurkan pemerintah hingga akhir Tahun 2024 sebesar Rp46,64 Triliun.

Pada awalnya, terdapat empat kanal penyaluran pembiayaan UMi, yaitu PT Bahana Artha Ventura, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, yang ketiganya merupakan BUMN, serta kepada beberapa koperasi simpan pinjam (KSAP) maupun kepada lembaga keuangan mikro (LKM). Dalam hal segmen pasar, masing-masing kanal mempunyai karakteristik yang berbeda. PNM membidik pengusaha mikro prasejahtera, perempuan, dengan rentang umur 18-62 tahun yang tinggal di daerah perkotaan dan sub-urban. Pembiayaan tanpa agunan diberikan untuk kelompok, yang anggotanya harus saling kenal sehingga saling percaya dan menanggung risiko bersama (tanggung renteng).

PT Pegadaian memberikan pinjaman dengan syarat harus ada agunan. Meski tidak melihat gender dan usia, jangkauan pembiayaan dari PT Pegadaian terbatas hanya 15 km dari lokasi cabang operasinya. Disisi lain, koperasi simpan pinjam menyediakan pembiayaan kepada anggotanya dan terbatas pada wilayah ijin operasionalnya. Sementara itu, lembaga keuangan mikro terbatas pada wilayah operasional hingga tingkat kabupaten. Dalam perkembangannya, PIP berupaya mengatasi batasan-batasan tersebut, serta menambah jumlah lembaga penyalur untuk memperluas jangkauan pembiayaan ultra mikro (UMi).



Apa yang telah Kami Lakukan

Program pembiayaan UMKM bukan sebatas memberikan pembiayaan yang cepat dan mudah bagi pengusaha ultra mikro, namun juga memastikan debitur secara bertahap bertambah kemampuannya dalam mengelola bisnis. Sejumlah kegiatan dan inovasi dalam rangka memberikan layanan pembiayaan telah kami lakukan, diantaranya:

Pemberdayaan Perempuan

Pembiayaan Ramah Perempuan

Lebih dari 96% debitur yang dibiayai oleh PIP berjenis kelamin perempuan.

Pelatihan dan pendampingan

Pelatihan dan Pendampingan

Beragam pelatihan dan pendampingan, mulai dari literasi keuangan, literasi digital, kewirausahaan, pendidikan, hingga kesehatan, disediakan oleh BLU PIP.

Kurasi Bisnis

Dalam rangka membantu pemasaran produk unggulan Debitur UMKM, PIP melakukan kurasi produk untuk ditampilkan karyanya di beberapa *event* nasional maupun internasional.

Inovasi Digitalisasi Pembiayaan UMKM



Dalam upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan pembiayaan, PIP mendorong pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan pada aplikasi SIKP, mulai dari proses pengajuan, pencairan, hingga penyaluran pembiayaan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

E-Proposal

Proses pengajuan pembiayaan dilakukan melalui *e-proposal*, yang memudahkan calon penyalur maupun penyalur mengajukan permohonan secara cepat dan terdokumentasi dengan baik.

E-Pencairan

Untuk mendukung pencairan dana, PIP juga mengembangkan sistem *e-pencairan* yang menyederhanakan proses dan mempercepat penyaluran dana ke penyalur.

Virtual Account

Selanjutnya, dalam rangka menjamin transaksi lebih aman, akurat, dan dapat dipantau secara *real-time*, penyaluran dari penyalur ke UMKM dilakukan melalui mekanisme *Virtual Account*.

UMi ICS



Pengembangan *Innovative Credit Scoring* (ICS) dilakukan untuk memperkirakan kelayakan kredit calon Penyalur/Mitra PIP. Aplikasi UMi-ICS menyematkan fungsi *artificial intelligence* (AI) dan *machine learning* serta konektivitas dengan industri/pasar khususnya pembiayaan pada berbagai sektor usaha yang dilakukan UMKM.

Inovasi dan Perbaikan Tata Kelola

Simeka



Dalam rangka perbaikan tata kelola terutama dalam pengelolaan keuangan, PIP melakukan beberapa perbaikan antara lain, aplikasi *geo tagging*, dan aplikasi simeka.

Aplikasi Simeka menyatukan proses perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan keuangan BLU PIP.

Perencanaan anggaran dilakukan melalui penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Pelaksanaan anggaran dimulai dari pembuatan SPP/SPM sampai dengan pembayarannya. Sementara itu, aplikasi Simeka menggunakan basis pencatatan akrual. Angka yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Neraca disajikan berdasarkan pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat dilakukan pengesahan transaksi pada unit yang memiliki fungsi perbendaharaan umum.

Dengan penyajian informasi akrual tersebut, pengguna laporan keuangan dapat memiliki informasi yang lebih andal dalam membuat keputusan.

Geo Tagging



Aplikasi *geo tagging* digunakan dalam rangka transparansi data dan akuntabilitas pegawai PIP yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pengembangan Dashboard



Dashboard dikembangkan dalam rangka menyajikan informasi kepada pengguna terkait dengan pembiayaan UMKM serta informasi pengelolaan serta kinerja keuangan.

→ Sudah dan terus berlanjut

Memperkuat kolaborasi dengan mitra penyalur dan mitra program

Pelatihan dan pendampingan untuk mitra penyalur maupun pelaku UMKM

Inovasi IT pada SIKP secara berkelanjutan
Peningkatan tata kelola keuangan yang berkelanjutan



Syarat penerima

Pembiayaan UMKM

- Orang perseorangan atau badan usaha
- Tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ditunjukkan dengan KTP elektronik
- Untuk badan usaha memiliki NPWP

Jenis Pembiayaan UMKM

- Pembiayaan UMi.
- Pembiayaan UMi Pro

Cara Pencairan

- Tunai
- Transfer melalui rekening
- Uang elektronik (wajib bagi penyalur non-afiliasi pemerintah)
- *Virtual Account* (VA)

Syarat menjadi mitra Penyalur untuk LKBB

- Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Lembaga Non LJK
- Memiliki pengalaman dalam pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, minimal 2 tahun
- Berkinerja baik, untuk LKBB memiliki NPL/NPF dibawah 5% dan *gearing ratio* kurang dari 10x
- Memiliki sistem informasi yang dapat terkoneksi dengan SIKP UMi
- Mempunyai kapasitas pendampingan terhadap debitur UMi
- Laporan Keuangan audited minimal WDP atau hasil pemeriksaan pengawasan dan disetujui anggota





Syarat menjadi mitra **Penyalur** untuk **Lembaga Non LJK**

- Memenuhi kriteria sebagai lembaga keuangan bukan bank
- Memiliki pengalaman dalam pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, minimal 2 tahun
- Memiliki sistem informasi manajemen yang mendukung, terkoneksi dengan SIKP UMi
- Mempunyai kapasitas pendampingan terhadap debitur UMi
- Memiliki profitabilitas positif dan DER kurang dari 4x
- Laporan Keuangan audited minimal WDP atau hasil pemeriksaan pengawasan dan disetujui anggota



Mitigasi **Risiko**

- PIP menggunakan *Innovative Credit Scoring* (ICS) untuk menganalisis tingkat risiko calon mitra penyalur dalam rangka menghindari risiko pembiayaan UMKM
- PIP mengenakan jaminan dari calon penyalur, berupa piutang lancar, *invoice*, bahan/peralatan/hasil usaha, resi gudang, deposit dana, dan/atau bentuk lain sesuai karakteristik usaha Penyalur, yang minimal setara dengan nilai plafon pembiayaan
- PIP juga dapat mengenakan jaminan tambahan kebendaan, seperti *fixed asset*, *Cash Collateral*, Logam Mulia, Tabungan Emas, dan Surat Berharga Negara. Selain jaminan kebendaan, dikenakan jaminan penanggungan berupa penjaminan, asuransi, dan *personal guarante*
- PIP melakukan *monitoring* secara *on desk* terhadap penyalur langsung dengan *dashboard credit rating* penyalur, berdasarkan kinerja keuangan setiap bulan sebagai upaya *early warning system*

Dampak Pembiayaan UMi pada UMKM di Indonesia

Periode Baseline Semester II 2023- Endline Semester II 2024

Hasil survei dengan total responden 694 debitur

**Nilai
Keekonomian
Debitur**
*baseline 35,42
endline 37,35*

Meningkat 1,94



**Nilai
Keekonomian
Pribadi**
*baseline 29,24
endline 30,5*

Meningkat 12,6



**Nilai
Keekonomian
Usaha**
*baseline 3,87
endline 3,94*

Meningkat 0,06



Indikator	Baseline	Endline	Selisih
NKP 1: Pengeluaran Listrik	3,84	4,09	0,25
NKP 2: Pengeluaran Konsumsi	3,58	3,97	0,39
NKP 3: Jenis Lantai Rumah	6,81	7	0,19
NKP 4: Kondisi Sanitasi	7,92	8,03	0,11
NKP 5: Rasio Anak Sekolah	6,05	6,19	0,13
NKP 6: Rata-Rata Tabungan	1,03	1,21	0,18
Total NKP	29,24	30,5	12,6
Total NKU	3,87	3,94	0,06
Total NKI	2,3	2,92	0,62
Total NKD	35,42	37,35	1,94

- Telah dilakukan survey serta analisis *Social Return On Investment* (SROI) untuk melakukan perhitungan manfaat sosial atas investasi yang dilakukan oleh PIP dalam program pembiayaan UMi dengan sampel penyaluran di wilayah kota dan kabupaten Bogor dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (monev) OIP tahun 2024
- *Social Return On Investment* (SROI) merupakan metode yang digunakan untuk mengukur dampak sosial dari suatu program. SROI membantu organisasi memahami nilai sosial dari program pembiayaan UMi melalui penilaian yang terstruktur dan mendalam.
- Survei SROI Pembiayaan UMi dilakukan kepada 3 (tiga) LKBB Penyalur pola *group lending* (PNM, Komida, KSPPS BMI) dengan responden sebanyak 853 debitur
- Survei dilakukan dengan 10 indikator dampak, yaitu: 1 indikator pada penyalur (peningkatan laba), serta 9 indikator pada debitur Pembiayaan UMi (kebutuhan listrik, konsumsi sehari-hari, pendidikan, kesehatan, air bersih, internet, saldo tabungan, gaji pegawai, & aset lainnya)
- Berdasarkan hasil survei dan perhitungan SROI tersebut, diperoleh hasil dari total *output*/pinjaman sebesar RP4.078.764.000,- menghasilkan *outcome* sebesar RP7.779.432.695,- (1,91) sehingga investasi dalam pembiayaan UMi sebesar Rp1 menghasilkan SROI sebesar Rp1,91

Sistem Pengendalian Risiko Bisnis

Badan Layanan Umum (BLU) PIP merupakan satuan kerja yang didirikan dalam rangka memberikan layanan publik yang bersifat khusus dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta berorientasi pada non-profit. Kekhususan BLU diantaranya dalam pengelolaan keuangan maupun kepegawaian.

BLU PIP meyakini bahwa tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif merupakan landasan utama untuk mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kinerja pembiayaan ultra mikro dan memberikan manfaat optimal bagi para pelaku usaha ultra mikro. Oleh karena itu, PIP menerapkan Sistem Pengendalian Risiko Bisnis (SPRB) yang komprehensif dan terintegrasi serta berkomitmen penuh terhadap budaya anti korupsi.

SPRB PIP dirancang dengan mempertimbangkan dua aspek utama:

- Risiko inheren, yaitu risiko yang melekat pada penyaluran pembiayaan UMI
- Pengendalian internal, dengan mengadopsi konsep manajemen risiko terintegrasi yang sejalan dengan praktik perbankan dan lembaga pembiayaan sejenis.

PIP mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko ke dalam delapan kategori utama yaitu: risiko keuangan, risiko kebijakan, risiko reputasi, risiko fraud, risiko legal, risiko kepatuhan, risiko kredit dan risiko operasional

Dengan SPRB yang efektif, PIP dapat:

- Mengidentifikasi permasalahan lebih dini
- Menindaklanjuti permasalahan dengan cepat dan tepat
- Mengelola risiko dengan lebih baik
- Menjaga kesehatan dan akuntabilitas bisnis BLU PIP.

Komitmen PIP terhadap tata kelola dan manajemen risiko yang baik telah diakui oleh Dewan Pengawas. Pada Tahun 2024, Dewan Pengawas menilai bahwa PIP telah menerapkan manajemen risiko dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaporan hasil perhitungan risiko bisnis komposit per semester kepada Pembina BLU serta kepada Dewan Pengawas.

Adapun nilai capaian pada Profil Risiko Bisnis PIP Semester II Tahun 2024 yaitu :

- a. Nilai Risiko Bawaan (inheren) dengan nilai 15 status Sedang (skala 1-25);
- b. Nilai Kecukupan Pengendalian Intern dengan nilai 91 status Kuat (skala 1-100); dan
- c. Nilai komposit secara keseluruhan berada pada nilai 79,83 status level Risiko Terkendali (skala 1-100)



Terdapat dua risiko tinggi yang telah dikelola dan ditangani adalah :

1. Risiko Kredit yaitu risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada PIP, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Risiko Kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak ketiga (*counterparty*), atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh penyediaan dana yang terkonsentrasi, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau sektor usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi kredit dan diperhitungkan dalam penilaian Risiko Inheren Mitigasi yang telah dilaksanakan :

- Monitoring kewajiban *revolving* penyalur/linkage
- Identifikasi potensi *revolving* dana idle
- Koordinasi dengan Penyalur untuk menggulirkan dana *idle* serta *update* data SIKP UMi
- Memberikan surat untuk melakukan revolving.
- Menambahkan pada pasal perjanjian terkait kewajiban *revolving* dan batasan dana idle yang dapat ditoleransi.

2. Risiko Operasional yaitu risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional PIP. Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Mitigasi yang telah dilaksanakan:

- Melakukan koordinasi dengan pemilik proses bisnis saat penyusunan UR
- Melakukan evaluasi progres pengerjaan pengembangan secara berkala
- Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemeliharaan dan pengembangan aplikasi.
- Menjadwalkan UAT dan Sos bimtek kepada pengguna sebelum *piloting* aplikasi



Manajemen Risiko

Hasil *risk assesment* penerapan manajemen risiko PIP tahun 2024
(per jenis risiko secara komposit tahunan)

No	Jenis Risiko	Risiko Bawaan (<i>Inheren</i>)		Pengendalian Internal		Risiko Netto
		Status	Nilai	Status	Nilai	
1	Keuangan	Sedang	2,8	Kuat	17,6	79,90
2	Kebijakan	Rendah	1,1	Kuat	8,8	95,80
3	Reputasi	Sedang	2,25	Kuat	13,2	62,80
4	Fraud	Sedang	0,75	Kuat	4,4	62,80
5	Legal	Rendah	0,55	Kuat	4,4	95,80
6	Kepatuhan	Sedang	1,30	Kuat	9,8	64,60
7	Kredit	Tinggi	3,80	Kuat	19,6	62,20
8	Operasional	Tinggi	2,70	Kuat	13,2	78,70
Nilai Komposit		Sedang	15	Kuat	91	79,83 (Risiko Terkendali)

BLU *Maturity Rating*

BLU *Maturity Rating* merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan manajemen BLU dalam mengelola organisasinya untuk mencapai tujuan dan menerapkan tata kelola yang baik.

Instrumen ini dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dan terdiri dari dua kelompok penilaian, yaitu:

- Penilaian berbasis hasil, menilai kemampuan BLU dalam mencapai target, baik target keuangan maupun target pelayanan.
- Penilaian berbasis proses, menilai kedalaman proses BLU yang meliputi aspek kapabilitas internal, tata kelola dan kepemimpinan, inovasi dan lingkungan.

Hasil Penilaian **BLU *Maturity Rating* 2024**

Hasil penilaian BLU *Maturity Rating* Tahun 2024:

- Tingkat maturitas keseluruhan 3,8 dari 5 (sangat bagus)
- Tingkat maturitas kinerja keuangan 4,4 (sangat bagus)
- Tingkat maturitas pelayanan 5 (sempurna)





Penjelasan **Hasil Penilaian**

- Tingkat maturitas keseluruhan 3,8 dari 5 (sangat bagus), menunjukkan bahwa PIP telah menunjukkan tingkat kematangan manajemen yang sangat bagus dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan dan menerapkan tata kelola yang baik.
- Tingkat maturitas kinerja keuangan 4,4 (sangat bagus), menunjukkan bahwa PIP memiliki tingkat kesehatan keuangan yang sangat bagus dengan likuiditas tinggi dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.
- Tingkat maturitas pelayanan 5 (sempurna), menunjukkan bahwa PIP mampu memberikan kepuasan layanan yang sempurna kepada masyarakat, memenuhi target layanan serta menyelesaikan pengaduan dengan tepat.

Area **Perbaikan**

Meskipun PIP telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, namun terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi, yaitu:

- Perlu menyusun prosedur formal untuk pelaksanaan manajemen perubahan yang efektif.
- Perlu mengidentifikasi kebutuhan internal dan eksternal terkait dengan pengelolaan jejak lingkungan dan penggunaan sumber daya dengan memperhatikan isu lingkungan terkini.

PIP telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penilaian BLU Maturity Rating Tahun 2024 menjadi acuan bagi PIP untuk terus melaksanakan perbaikan dan inovasi dalam mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.



Membangun **Budaya Anti Korupsi**

PIP berkomitmen untuk membangun budaya anti korupsi dengan berbagai langkah strategis melalui berbagai sarana terutama media yang dikelola oleh PIP.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen PIP dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi dan membangun tata kelola yang baik di lingkungan PIP.

PIP juga akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja pembiayaan UMi melalui tata kelola dan manajemen risiko yang kuat serta komitmen terhadap budaya anti korupsi. Dengan upaya berkelanjutan ini, PIP dapat memberikan manfaat optimal bagi para pelaku usaha ultra mikro serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kontak Pengaduan



<https://www.pip.kemenkeu.go.id>



<https://www.wise.kemenkeu.go.id>



<https://www.lapor.go.id>



<https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id>



085811754577



Jl. Dr. GSSJ Ratulangi No.17, Gondangdia,
Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta



pengaduan.pip@kemenkeu.go.id
upg.pip@gmail.com



Filosofi Logo



Logo BLU PIP

Tulisan BLU PIP menyerupai tunas bunga yang melambangkan harapan dan usaha terbaik mengangkat pelaku usaha mikro untuk naik kelas dari sisi kualitas bisnis dan kelangsungan hidup. Sebuah simbol yang mewakili kerja keras, komitmen dan memberikan manfaat bagi orang lain

PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

Penggunaan huruf kapital menandakan ketegasan komitmen Pemerintah dalam memberikan kontribusi dengan mengangkat ekonomi pelaku usaha mikro di Indonesia.

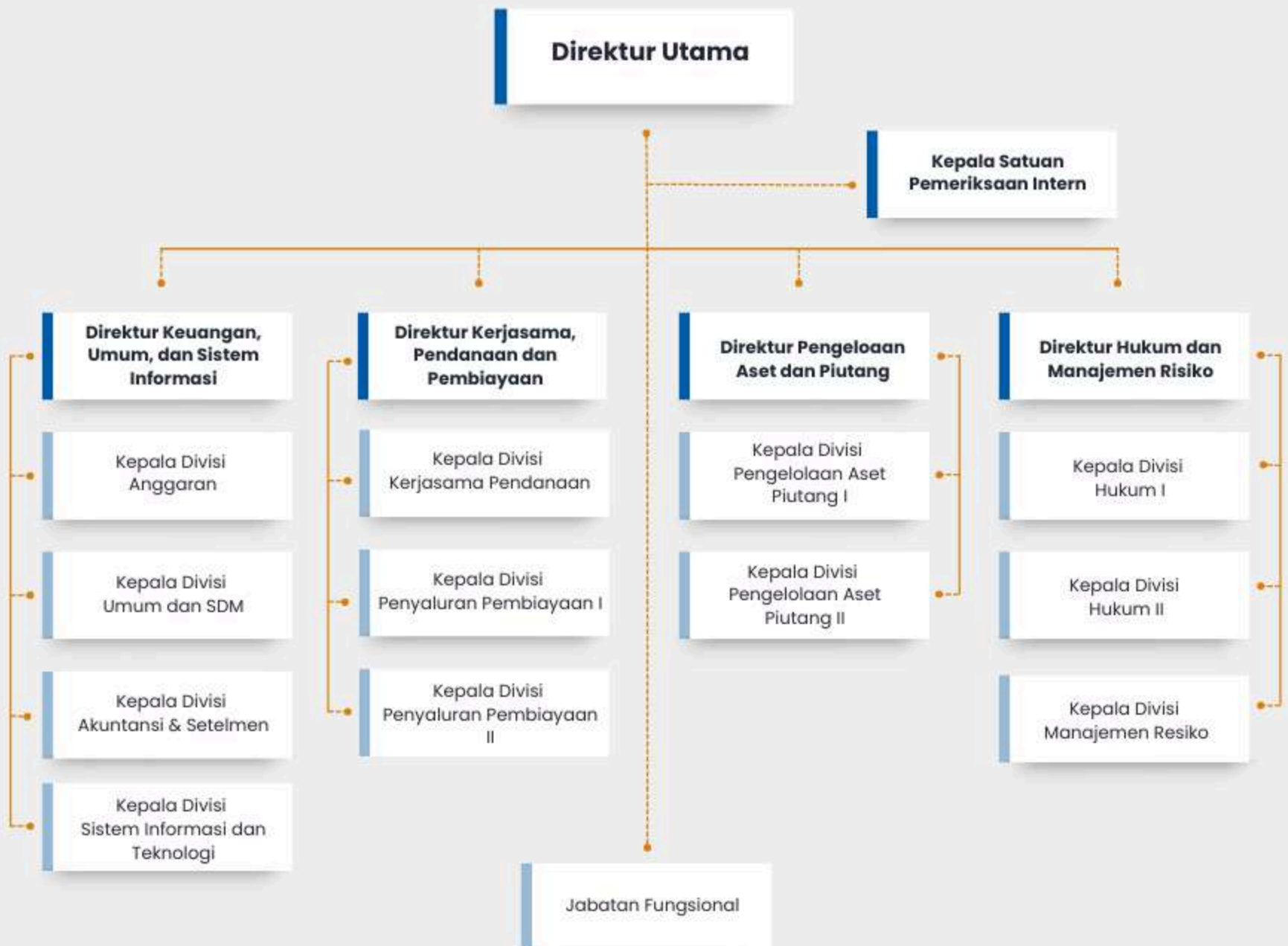
Bentuk logo dengan huruf kapital



Warna Biru Tua

Melambangkan rasa tenang, menyejukkan, terbuka, inspiratif, stabil, dan dapat diandalkan. Menyimbolkan profesionalisme, komitmen membangun dan handal serta dapat dipercaya.

Struktur Organisasi







Profil **Dewan Pengawas**



ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Jakarta, 20 Januari 1968

**Ketua merangkap
Anggota Dewan
Pengawas**



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Tahun 1990
- Menyelesaikan pendidikan S2 Master of Taxation Tahun 1997

Pengalaman Kerja

- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Keuangan (2017-2018)
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (2018-2022)
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (2022-sekarang)

Riwayat Penunjukan Anggota Dewas

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2023 Tahun 2023.

RIRIN KADARIYAH

Jakarta, 18 Juni 1972

**Anggota Dewan
Pengawas**



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum, Universitas Gajah Mada Tahun 1996
- Menyelesaikan pendidikan S2 Administrasi Publik, Universitas Gajah Mada, Tahun 2005

Pengalaman Kerja

- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Tenggara (2017-2019)
- Direktur Utama PIP (2019-2023)
- Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum - PPK BLU, (2023-2025)
- Direktur PNBPKL, Direktorat Jenderal Anggaran (2025-sekarang)

Riwayat Penunjukan Anggota Dewas

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.05/2023 Tahun 2023.

PUTUT HARI SATYAKA

Surakarta, 9 Juli 1973

**Anggota Dewan
Pengawas**



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi, Tahun 1996
- Menyelesaikan pendidikan S2 Master of Public Policy, Tahun 2007

Pengalaman Kerja

- Direktur Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (2016-2019)
- Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (2019-2021)
- Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran (2021-2025)
- Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan (2025-sekarang)

Riwayat Penunjukan Anggota Dewas

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2023 Tahun 2023.

YULIUS

Jakarta, 24 April 1967

Anggota Dewan Pengawas



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi, Universitas Gajah Mada, Tahun 1992
- Menyelesaikan pendidikan S2 di International University of Japan, Tahun 1999
- Menyelesaikan pendidikan S3 di Universite D'Auvergne France, Tahun 2006

Pengalaman Kerja

- Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM, Kemenko Perekonomian (2015-2016)
- Asisten Deputy Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian (2016-2020)
- Plt. Asisten Deputy Pengembangan Kewirausahaan, Kemenko Perekonomian (2018-2020)
- Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Kemenko Perekonomian (2020-2021)
- Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Kementerian Koperasi dan UKM (2021)
- Deputy Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM (2022-sekarang)

Riwayat Penunjukan Anggota Dewas

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2023 Tahun 2023.

ELAN SATRIAWAN

Jakarta, 24 April 1967

**Anggota Dewan
Pengawas**



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi, Universitas Gajah Mada, Tahun 1996
- Menyelesaikan pendidikan S2 Master of Economic of Development, Australian National University Australia, 2000.
- Menyelesaikan pendidikan S3 di Michigan State University, 2009.3.

Pengalaman Kerja

- Tim Asistensi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat

Riwayat Penunjukan Anggota Dewas

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2023 Tahun 2023.

Laporan

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BLU PIP ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.05/2023 , dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Dewan Pengawas	Jabatan
1	Astera Primanto Bhakti	Ketua Merangkap Anggota
2	Ririn Kadariyah	Anggota
3	Yulius	Anggota
4	Putut Hari Satyaka	Anggota
5	Elan Satriawan	Anggota

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas BLU PIP senantiasa berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 (PMK 129/2020). Berdasarkan ketentuan PMK 129/2020, Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihan kepada pejabat pengelola BLU PIP.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas berkewajiban untuk:

1. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
2. Memantau dan memastikan bahwa tata kelola dan upaya pencapaian target kinerja BLU telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
3. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas yang terintegrasi dengan RBA;
4. Membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
5. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan dan Pejabat Pengelola mengenai, tetapi tidak terbatas pada, RSB dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola;
6. Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
8. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari Satuan Pemeriksaan Intern, Auditor Intern Pemerintah, Auditor Eksternal, Pembina BLU dan pihak lain telah ditindaklanjuti; serta
9. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsinya Dewan Pengawas BLU PIP telah mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu bulan dengan Pejabat Pengelola BLU PIP. Dalam setiap rapat, dilakukan pembahasan agenda dan topik sesuai isu atau permasalahan yang dihadapi pada periode berkenaan.

Dalam kesempatan rapat Dewan Pengawas BLU telah memberikan nasihat dan menuangkannya melalui laporan Dewan Pengawas BLU PIP yaitu pada periode Semester I dan Semester II Tahun 2024. Laporan tersebut merupakan ikhtisar dari arahan Dewan Pengawas, yang terdiri dari:

- a. Tinjauan Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran BLU;
- b. Tinjauan Kinerja Layanan dan Keuangan;
- c. Tata Kelola dan Akuntabilitas;
- d. Tindak Lanjut Atas Hasil Pengawasan Sebelumnya; dan
- e. Kesimpulan dan Rekomendasi.

Secara ringkas, nasihat yang telah disampaikan selama tahun 2024, dapat diikhtisarkan sebagai berikut

Tinjauan Rencanan Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran BLU

Dewan Pengawas juga telah menyampaikan review dan catatan atas Dokumen RSB BLU PIP, diantaranya penegasan bahwa BLU PIP harus menjadi institusi yang membantu UMKM secara nyata serta penetapan program yang lebih *impactful* atau lebih berdampak bagi masyarakat sejalan dengan program Presiden terpilih yaitu swasembada pangan atau program prioritas lain sebagai bagian dari Asta Cita Presiden;

Berkaitan dengan RBA, Dewan Pengawas BLU PIP telah melakukan tinjauan dan telah memberikan persetujuan atas Dokumen RBA Tahun 2024, Dokumen Perubahan RBA Tahun 2024, Dokumen RBA Definitif Tahun 2024, dan Dokumen Revisi RBA Definitif Tahun 2024. Dalam setiap penetapan dan pemberian persetujuan Dokumen RBA tersebut, Dewan Pengawas BLU PIP telah melakukan tinjauan dan menyampaikan catatan secara tertulis mengenai hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Pengelola BLU PIP, antara lain terkait dengan efisiensi belanja.

Reviu Kinerja Layanan dan Keuangan

Atas capaian kinerja BLU PIP Tahun 2024, dengan menggunakan indikator indeks capaian kinerja yang sudah ditetapkan, Dewan Pengawas BLU PIP berpendapat bahwa kinerja BLU PIP sudah sangat baik karena hampir semua indeks capaian terkait dengan layanan BLU PIP berhasil melampaui target yang ditetapkan. Sehubungan dengan indeks capaian yang masih berwarna kuning, Dewan Pengawas BLU PIP dapat menerima kondisi yang menjadi penyebab tidak tercapainya target dimaksud. Namun demikian Dewan Pengawas BLU PIP menegaskan bahwa untuk IKU yang tidak tercapai agar dimitigasi apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tersebut. Selain itu, berkaitan dengan kinerja layanan BLU PIP, Dewan Pengawas BLU PIP memberikan beberapa catatan yaitu:

BLU PIP perlu melihat kembali rumusan IKU Tahun 2024, karena dengan dinamika dan kondisi yang ada sekarang, terdapat bagian-bagian yang seharusnya dapat dimodifikasi, digabungkan, atau menjadi rincian di bawahnya.

Berkenaan dengan rumusan IKU BLU PIP, Dewan Pengawas menginginkan agar lebih dinamis sesuai dengan sifat yang melekat pada BLU yaitu adanya fleksibilitas, tidak sekedar tambah kurang. Atas capaian IKU yang sudah terpenuhi, hendaknya tidak dimasukkan kembali. Apabila sudah tidak bisa diubah lagi, maka harus dirumuskan dengan benar dan lebih dikuatkan. Dewan Pengawas tetap berharap agar hal-hal seperti ini dapat dirumuskan kembali karena karakteristik fleksibilitas yang dimiliki BLU.

Berkenaan dengan Teknologi Informasi (SIKP) agar dipikirkan hal-hal yang benar-benar mencerminkan bagaimana organisasi BLU PIP dapat bertambah maju dan berkembang. Dewan Pengawas berpendapat agar BLU PIP melakukan penguatan kelembagaan.

Tata Kelola dan Akuntabilitas

Tata Kelola yang baik pada BLU adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan BLU berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan BLU yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan BLU, berlandaskan peraturan-perundangan. Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip akuntabilitas,

Dewan Pengawas BLU PIP memberikan perhatian khusus terkait proses pemeriksaan laporan keuangan BLU oleh auditor ekstern maupun pengawasan yang dilakukan oleh APIP serta mendorong tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan.

Tindak Lanjut atas Pengawasan Sebelumnya

Pada kesempatan penyampaian rekomendasi sebelumnya, Dewan Pengawas BLU PIP telah menyampaikan:

- Berkenaan dengan telah disusunnya Draft Rencana Strategis Bisnis BLU PIP Tahun 2025–2029, Dewan Pengawas merekomendasikan Pengelola BLU agar dapat segera menindaklanjuti penetapan dokumen RSB dimaksud sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen RBA Tahun 2025.
- Berkaitan pelaksanaan manajemen risiko BLU PIP, Dewan Pengawas merekomendasikan kepada Pengelola BLU agar melakukan *assessment* pola pemberian kredit yang dilakukan selama ini melalui pengembangan sistem pemantauan yang membuat BLU PIP dapat mengetahui upaya yang telah dilakukan debitur sehingga debitur mampu mengembalikan kredit.
- Berkenaan dengan usulan perluasan mandat yang akan dituangkan dalam regulasi mengenai pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah, Dewan Pengawas merekomendasikan agar Pengelola BLU melakukan persiapan untuk pengimplementasian hal tersebut, termasuk penyiapan rumusan kebijakan manajemen risikonya.

Atas rekomendasi pertama, terkait dengan penetapan dokumen RSB, Dewan Pengawas menilai Pengelola BLU PIP telah melaksanakannya. Selanjutnya atas rekomendasi kedua yang berkaitan dengan manajemen risiko terkait *assessment* pola pemberian kredit, BLU PIP juga dinilai oleh Dewan Pengawas telah memenuhinya dengan melakukan pengembangan *Early Warning System* menjadi lebih baik. Terkait dengan rekomendasi ketiga yaitu berkenaan dengan usulan perluasan mandat yang akan dituangkan dalam regulasi mengenai pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah, Dewan Pengawas menilai bahwa saat ini upaya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan masih berjalan prosesnya. Implementasi tindak lanjut atas hal tersebut sudah dipersiapkan untuk bisa dilaksanakan di tahun 2025.



Kesimpulan dan Rekomendasi

Atas capaian kinerja berdasarkan dokumen RSB dan RBA, capaian kinerja layanan dan Keuangan serta proses tata kelola dan akuntabilitas, Dewan Pengawas berkesimpulan bahwa pengelolaan yang dijalankan oleh Pengelola BLU PIP selama tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Namun demikian, sampai dengan saat ini BLU PIP masih menghadapi permasalahan berkenaan dengan belum tersusunnya Dokumen RSB Tahun 2025-2029 dan Dokumen RBA Tahun 2025. Untuk itu Dewan Pengawas BLU PIP memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Pengelola BLU agar terus melakukan perbaikan atas pengembangan *Early Warning System* sebagai bagian dari mitigasi risiko penyaluran pembiayaan dan memantau kesehatan finansial debitur. Dalam hal ini Pengelola BLU perlu memperhatikan basis data yang digunakan agar lebih *real time* dan meningkatkan kualitas data agar dapat membantu Pengelola BLU dalam mengantisipasi potensi permasalahan yang akan terjadi terutama terkait mitigasi risiko penyaluran mulai dari proses seleksi debitur dan proses repayment oleh debitur.
- Terkait rencana restrukturisasi organisasi, Pengelola BLU agar melakukan perbaikan atas usulan rumusan struktur organisasi BLU PIP yang baru dengan mempertimbangkan bahwa organisasi yang baru harus dapat menghadapi pola penugasan yang dinamis, memperhitungkan konsep *delaying*, memperhatikan distribusi beban kerja, mengurangi fungsi dukungan manajemen dan memperkuat fungsi pengurusan bisnis BLU yang lebih dominan.
- Berdasarkan data-data terkait komposisi sumber pendapatan BLU PIP terhadap total pendapatan BLU PIP dan Saldo Anggaran Lebih yang terus meningkat, Dewan Pengawas menyarankan agar Pengelola BLU PIP terus meningkatkan kinerja layanan pembiayaan atau kinerja penyaluran. Apabila dana kelolaan tidak mencukupi, agar dipertimbangkan untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih untuk menambah dana kelolaan dan memperluas cakupan penyaluran;
- Berkenaan dengan kewajiban Pengelola BLU dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU (*unaudited*) dan Laporan Capaian Kinerja Layanan BLU (Capaian Target Indikator Kinerja BLU), baik untuk periode Semester I maupun Semester II setiap tahun, hendaknya Pengelola BLU memperhatikan tenggat waktu penyusunan Laporan dimaksud agar dapat disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat pada 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.



Profil **Direksi**

ISMED SAPUTRA

Pekanbaru, 13 Mei 1971

Direktur Utama



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan Pendidikan S1 Manajemen di Universitas Bung Hatta tahun 1995
- Menyelesaikan Pendidikan S2 Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA tahun 2001

Pengalaman Kerja

- Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
- Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
- Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
- Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 - sekarang

Riwayat Penunjukan

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159 tahun 2023

MAS SOEHARTO

Gresik, 22 September 1969

**Direktur Keuangan,
Umum, dan Sistem
Informasi**



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan Pendidikan D3 Spesialisasi Anggaran di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 1991
- Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Politik Administrasi Negara di Universitas Terbuka tahun 2001
- Menyelesaikan Pendidikan S2 Ilmu Hukum di Universitas Pancasila tahun 2012

Pengalaman Kerja

- Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Makassar, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan tahun 2014-2017
- Kepala Bagian Perlengkapan, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan tahun 2017-2019
- Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan tahun 2019-2022
- Kepala Bagian Administrasi Kementerian, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan tahun 2022-2023
- Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi PIP tahun 2023 - sekarang

Riwayat Penunjukan

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.01/2023

MUHAMMAD YUSUF

Banjarmasin, 4 Desember 1972

Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan Pendidikan S1 Ekonomi di STIE Yogyakarta 1997
- Menyelesaikan Pendidikan S2 Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada 2006

Pengalaman Kerja

- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makale, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan 2009 – 2011
- Kepala Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2011-2013
- Kepala Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU I, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2013-2015
- Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Timur 2015-2019
- Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP tahun 2019 - sekarang

Riwayat Penunjukan

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159 tahun 2023

IMADUDDIN

Pekalongan, 11 November 1971

Direktur Hukum dan Manajemen Risiko



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan Pendidikan D3 Spesialisasi Anggaran di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 1991
- Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Terbuka tahun 1998
- Menyelesaikan Pendidikan S2 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta tahun 2002

Pengalaman Kerja

- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 2017-2019
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, Direktorat Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 2019-2023
- Direktur Hukum dan Manajemen Risiko PIP tahun 2023 - sekarang

Riwayat Penunjukan

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.01/2023

JADI HAPOSAN MANURUNG

Tanah Jawa, 20 November 1973

Direktur Pengelolaan Aset Piutang



Riwayat Pendidikan

- Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum, Universitas Sumatra Utara, Tahun 1995
- Menyelesaikan pendidikan S2 Public Policy, Flinders University, 2007.
- Menyelesaikan pendidikan S3 Financial Services, Victoria University, 2015.

Pengalaman Kerja

- Kepala Bidang Program dan Kegiatan I, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Kementerian Keuangan.
- Kepala Bidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya Aparatur, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Kementerian Keuangan
- Direktur Pengelolaan Aset Piutang PIP tahun 2024 - sekarang

Riwayat Penunjukan

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 354 Tahun 2024.

Laporan Manajemen



Laporan Direksi

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dapat menyelesaikan tahun 2024 dengan pencapaian yang memuaskan. Laporan ini memaparkan kinerja PIP selama tahun 2024, beserta analisis, prospek usaha, kebijakan strategis, dan perkembangan penerapan tata kelola.

Tahun 2024 menjadi tahun yang membanggakan bagi PIP. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, kami berhasil menorehkan kinerja gemilang dengan melampaui target yang ditetapkan. Jumlah debitur yang mendapatkan pembiayaan PIP sebesar 2,2 juta, dengan nilai penyaluran pembiayaan meningkat 15% dari Rp9,48 triliun menjadi Rp10,93 triliun.

Penyaluran pembiayaan UMi di tahun 2024 didominasi oleh wilayah Pulau Jawa dengan porsi 65%. Sektor perdagangan eceran menjadi sektor yang paling banyak menerima pembiayaan, yaitu mencapai 97%. Selain itu, hampir 57% pembiayaan UMi merupakan pembiayaan syariah, 96% disalurkan kepada pengusaha perempuan, dan 42% disalurkan kepada pengusaha muda di bawah 40 tahun. Perlu dicatat bahwa 85% plafon pinjaman UMi kurang dan sama dengan Rp5 juta per debitur.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa PIP telah menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mendorong pengembangan wirausaha ultra mikro di Indonesia. Kami terus berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak debitur di seluruh wilayah Indonesia. Penambahan jumlah debitur tentunya perlu ditopang oleh penambahan jumlah penyalur. Untuk 2024, PIP menargetkan ada tambahan 25 lembaga penyalur baru. Hingga akhir tahun, tercatat ada 19 mitra baru, atau tumbuh 21% menjadi 109 dari sebelumnya 90 lembaga penyalur.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pinjaman, kami membuat *UMi Innovative Credit Scoring (UMi-ICS)*, serta mengembangkan modul MONEV. Untuk kegiatan pemberdayaan, kami mengadakan pelatihan pembuatan bahan kerajinan dari kertas bekas, pelatihan platform e-katalog LKPP, pelatihan kewirausahaan perempuan bersama UN Women, *showcase* produk UMKM pada kegiatan KTT ASEAN, pembentukan Kedai UMi di 10 kota, mengadakan Festival UMi 2024, pembentukan kampung UMi Klaster Tenun di NTT dan Klaster Madu di Purwokerto, serta pelatihan pengurus koperasi melalui kegiatan PIP *Empower*.

Analisis Prospek Usaha

Ke depan, PIP optimistis dengan prospek pembiayaan UMKM dengan dukungan beberapa faktor, antara lain:

- Meningkatnya jumlah pengusaha UMKM di Indonesia.
- Tingginya minat masyarakat untuk menjadi wirausahawan.
- Perkembangan teknologi yang membuka peluang usaha baru bagi UMKM.
- Penambahan jumlah penyalur UMi baru.
- Inovasi produk dan layanan baru pembiayaan UMKM.
- Penguatan kerjasama dengan berbagai pihak.
- Dukungan pemerintah yang semakin besar terhadap pengembangan dan penguatan UMKM.

PIP akan terus berinovasi dan meningkatkan layanannya dalam rangka mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi UMKM.

Kebijakan Strategis

PIP telah mengembangkan sejumlah kebijakan strategis dalam rangka mendukung UMKM antara lain:

- Perluasan kanal pembiayaan melalui Non LJK.
- Meningkatkan kapasitas penyalur melalui PIP Empower.
- Peningkatan kualitas pendampingan melalui program pelatihan terhadap para *account officer* dan standarisasi materi pendampingan untuk memastikan bahwa pengusaha ultra mikro mendapatkan dukungan yang optimal. Pada 2024, telah dilakukan pelatihan kepada 389 *account officer* dan 2.979 debitur dari berbagai wilayah. Kami juga bekerja sama dengan kalangan akademisi dalam membuat standar materi pendampingan, dan memastikan apa yang mereka pelajari langsung diteruskan kepada debitur. Pelatihan ini mencakup materi tentang legalitas usaha, sertifikasi usaha, beragam aspek produk, pembukuan atau pencatatan keuangan, serta aspek pemasaran.
- Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada debitur untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka. Untuk memudahkan pelaporan para pendamping kepada penyalur dan PIP, kami telah meluncurkan aplikasi mobile yang dilengkapi dengan kemampuan geotagging. Pendamping dapat menginput kegiatan hariannya, merinci debitur yang didampingi, dengan demikian penyalur dan PIP dapat memantau kinerjanya.
- Menjaring wirausaha muda melalui program UMi *Youthpreneur* untuk mendorong regenerasi wirausaha di Indonesia. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga penyelenggaraan kegiatan tersebut.

- Bagi penyalur, kami memberi komitmen tarif layanan yang rendah. Tren suku bunga perbankan meningkat, tetapi PIP terus berusaha menekan beban pinjaman agar seringan mungkin bagi debitur. Tingkat bunga yang kami berikan kepada penyalur berkisar dari 0% hingga 4%. Kami berharap penyalur dapat terus menekan tingkat bunga menjadi semakin terjangkau bagi pengusaha UMi untuk mendorong pertumbuhan usaha mereka.
- Memperluas kerjasama dengan berbagai pihak, seperti kementerian/lembaga terkait, perbankan, dan organisasi masyarakat, untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan sinergi.
- Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pengusaha ultra mikro dalam meningkatkan usahanya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola

PIP berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel. Komitmen ini diwujudkan dengan berbagai langkah, antara lain:

- Penyederhanaan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Terkait standar pelayanan sudah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, mulai 2023 telah dirinci batasan waktu pengerjaan/pemrosesan yakni penetapan LKBB sebagai penyalur paling lama 10 hari, persetujuan kerjasama pembiayaan dengan LKBB maksimal 22 hari kerja, dan waktu kerjasama pendanaan dengan Pemda atau pihak lain paling lama 39 hari kerja.
- Penetapan standar pelayanan minimum untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada pengusaha ultra mikro.
- Melakukan survei kepuasan pengguna layanan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan mendapatkan masukan untuk perbaikan. PIP memperoleh hasil yang memuaskan dalam Survei kepuasan Pengguna Layanan di lingkungan Kementerian Keuangan. Survei dilakukan secara daring kepada penyalur maupun pihak terkait lainnya. untuk menilai harapan dan kepuasan para pengguna layanan. Kami memperoleh skor 4,69 dari skala 5,00 atau ada ditingkat yang memuaskan. Survei ini menunjukkan PIP sebagai badan layanan umum mampu memenuhi harapan masyarakat, dengan menyelenggarakan layanan yang berkualitas dan profesional.
- Kami terus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Kami juga bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal mengidentifikasi calon penyalur baru.

- Bersama kalangan akademisi, kami bekerja sama dalam penyelenggaraan riset untuk memotret efektivitas UMi sehingga mendapatkan umpan balik yang memadai sebagai bekal perbaikan.
- Kami terus berupaya untuk menjadi lembaga pembiayaan UMKM terdepan di Indonesia. Dengan komitmen dan kerja keras seluruh insan PIP, kami yakin dapat mencapai target dan tujuan, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan UMKM di Indonesia.

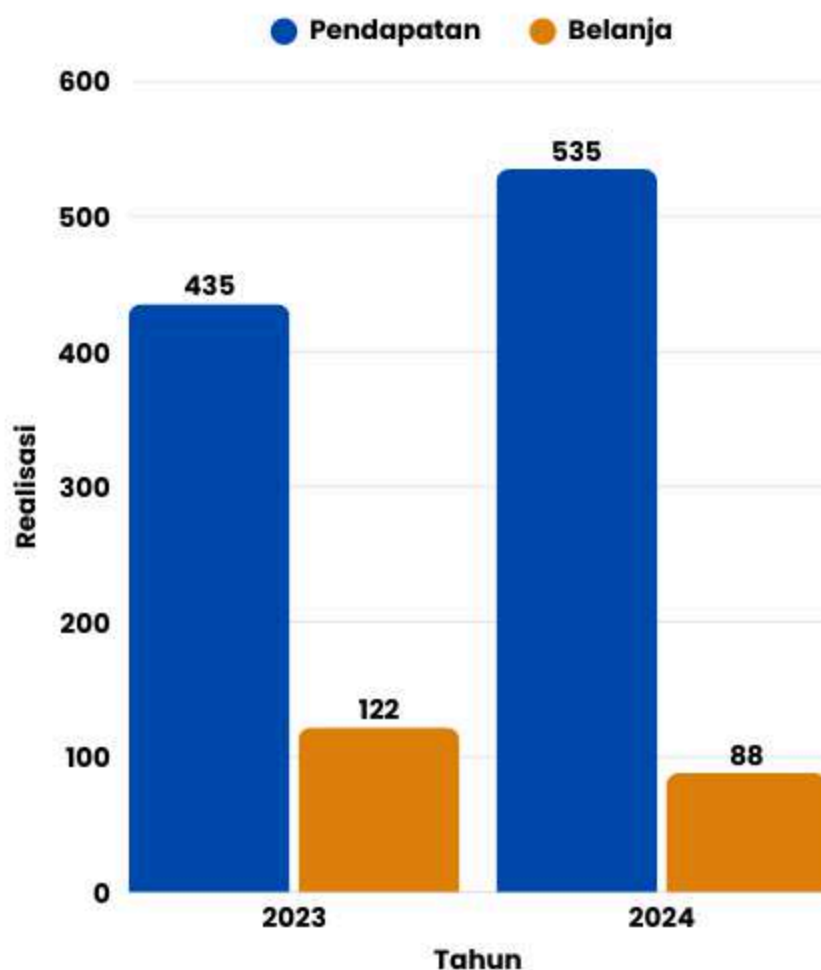


Kinerja Keuangan

Berikut ini, informasi mengenai realisasi pelaksanaan anggaran, kinerja keuangan, posisi keuangan, arus kas, serta perubahan ekuitas BLU PIP selama Tahun 2024.

Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan dan Belanja (dalam Miliar)



BLU PIP mencatat pertumbuhan pendapatan yang kuat, yang mencapai Rp534,97 miliar, naik 23% dibandingkan dengan Tahun 2023 yang mencapai Rp434,83 Miliar. Capaian realisasi pendapatan ini juga melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp336,1 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja untuk periode Tahun 2024 sebesar Rp88,37 Miliar, turun 30,5% dibandingkan dengan realisasi belanja periode Tahun 2023 sebesar Rp121,89 Miliar. Realisasi belanja Tahun 2024 terdiri dari belanja barang sebesar Rp84,99 Miliar dan belanja modal sebesar Rp3,38 Miliar

Grafik di bawah ini menunjukkan kinerja penerimaan pendapatan dan belanja BLU PIP selama sewindu dari Tahun 2017-2024.

Realisasi Pendapatan dan Belanja (dalam Miliar)



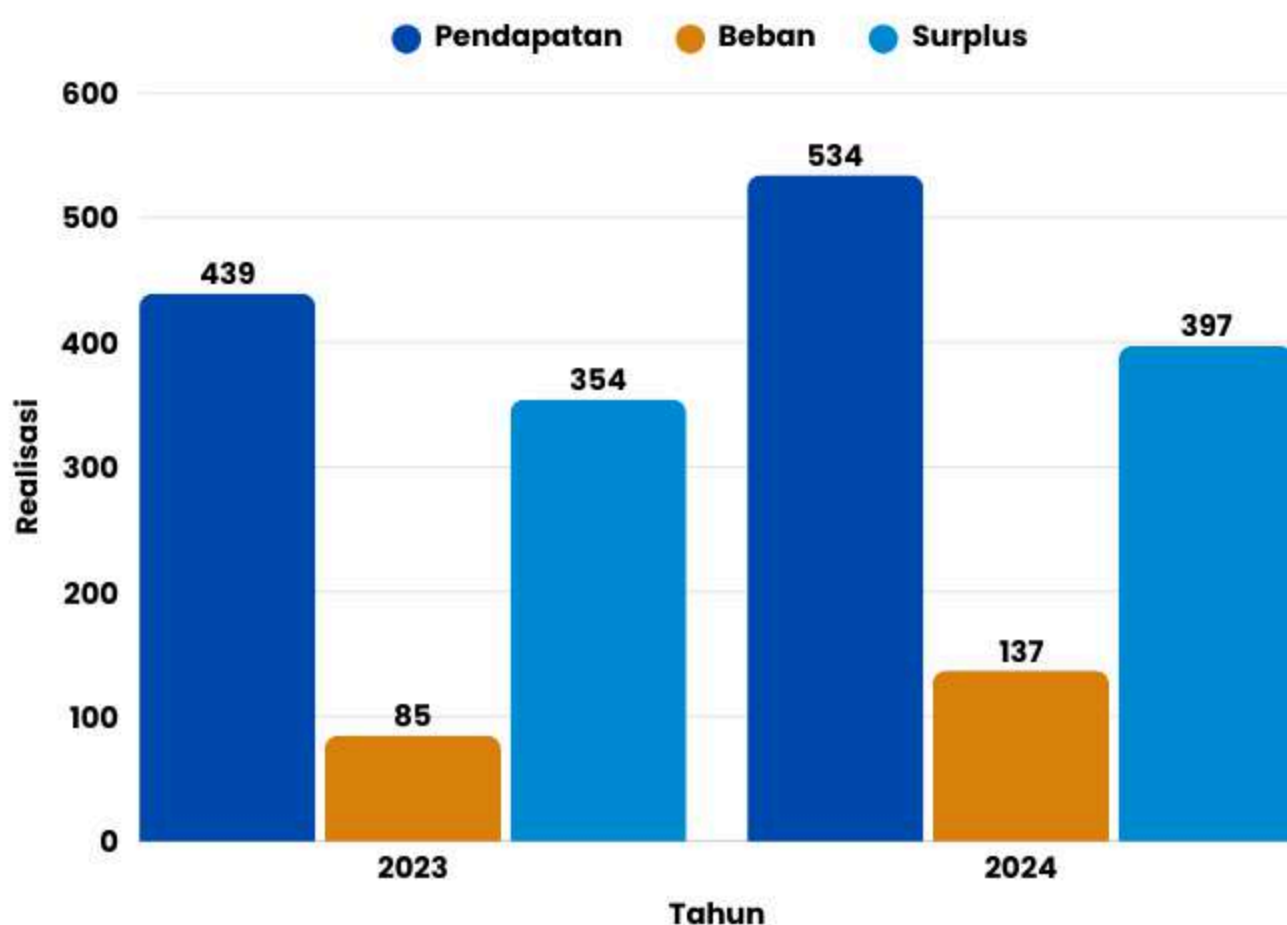
Penurunan pendapatan pada tahun 2021-2022 antara lain disebabkan dampak pandemi Covid-19, dimana kinerja penyaluran mengalami penurunan yang mengakibatkan penurunan pendapatan PIP.

Disisi lain, peningkatan belanja PIP pada Tahun 2023 merupakan belanja renovasi gedung kantor baru PIP.

Laporan Operasional (Kinerja Keuangan)

Selama Tahun 2024, BLU PIP mencatatkan surplus sebesar Rp396,09 miliar, yang berasal dari pendapatan sebesar Rp533,55 miliar dikurangi dengan beban tahun berjalan sebesar Rp137,46 miliar. Nilai surplus ini terus meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

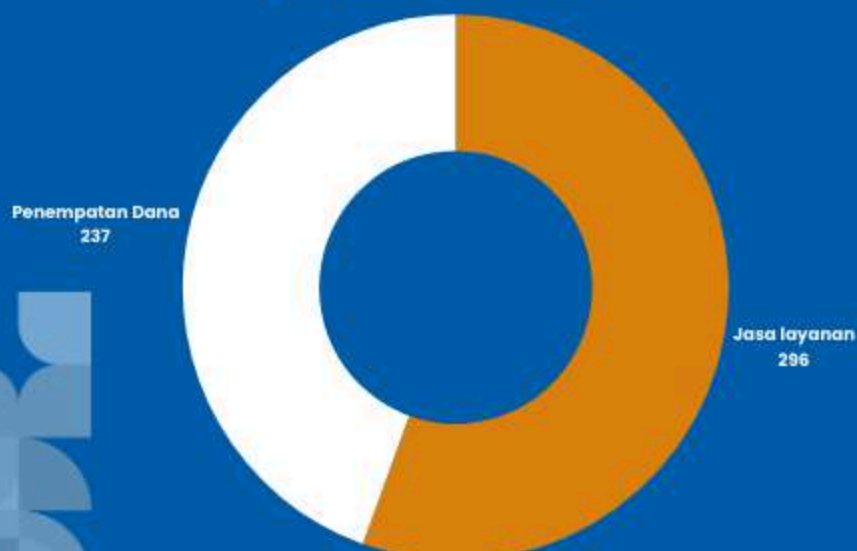
Pendapatan dan Beban (dalam Miliar)



Catatan terkait kinerja keuangan tahun 2024

Proporsi Pendapatan Operasional (dalam Miliar)

Jasa layanan Penempatan Dana

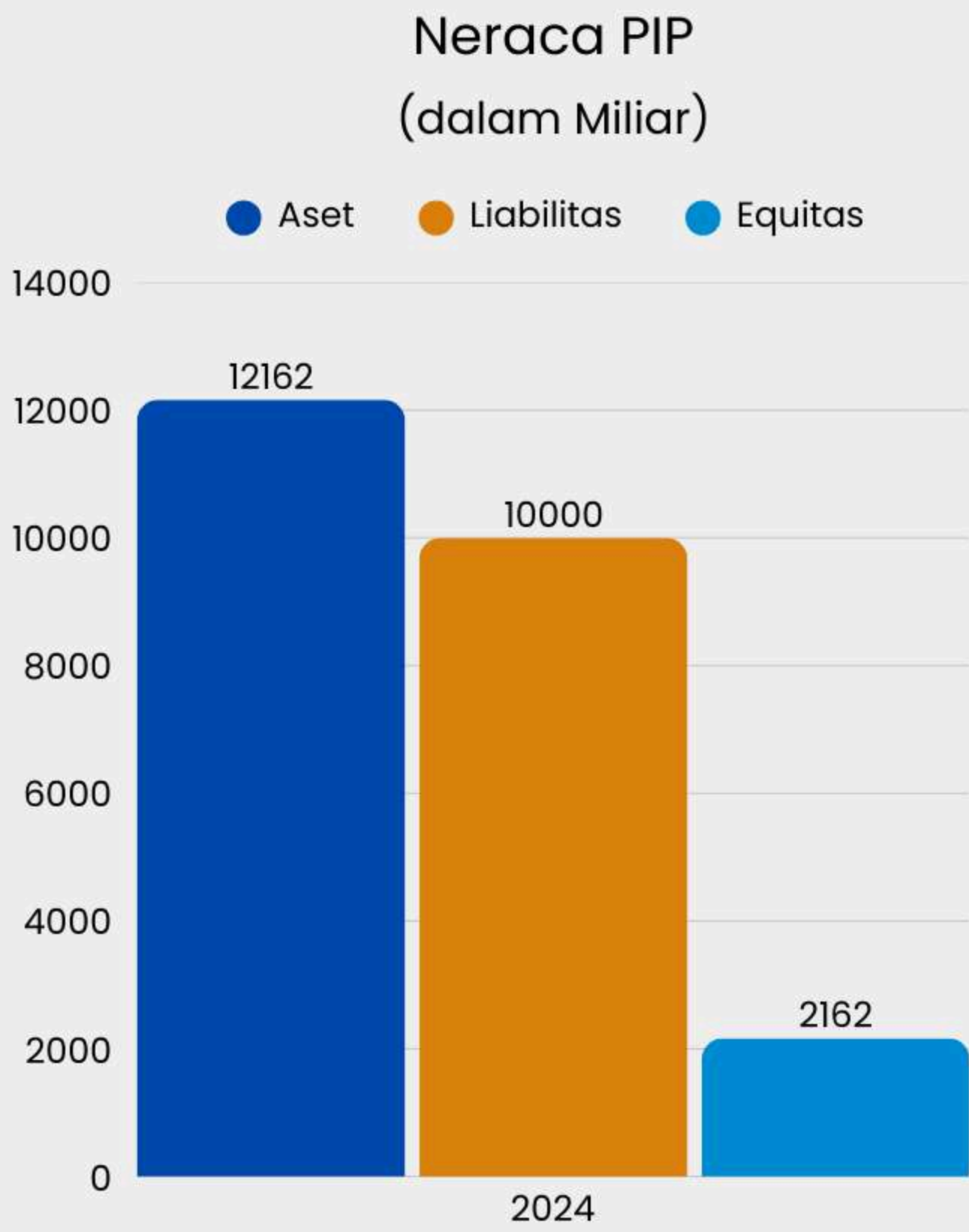


Pendapatan tahun 2024 sebesar Rp533,55 miliar, terdiri dari pendapatan jasa layanan masyarakat sebesar Rp296,45 dan pendapatan lainnya sebesar Rp237,1.

Sementara itu beban operasional PIP sebesar Rp137,55 terdiri dari beban pegawai Rp43,2 miliar, beban persediaan Rp0,2 miliar, beban barang dan jasa Rp29,89 miliar, beban pemeliharaan Rp0,5 miliar, beban perjalanan dinas Rp12,6 miliar, beban penyusutan dan amortisasi Rp3,88 miliar serta beban penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp47,28 miliar.

Neraca (Posisi Keuangan)

Neraca menyajikan posisi aset, liabilitas serta ekuitas BLU PIP. Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024, terdiri dari aset sebesar Rp12.162,4 miliar, liabilitas sebesar Rp10.000 miliar serta ekuitas sebesar Rp2.162,4 miliar.







📍 Jl. Dr. GSSJ Ratulangi No.17,
RT.2/RW.3, Gondangdia, Kec.
Menteng, Kota Jakarta Pusat

☎ 021 3924822

🌐 PIP.KEMENKEU.GO.ID